

Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran

Mutiara Salsabila¹

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 11, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 30 2023

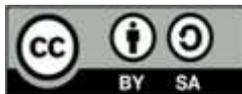
Available online January 03, 2024

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, Diskriminasi, Kekerasan

Keywords:

Human Rights, Discrimination, Violence



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap orang tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia mencerminkan bahwa kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh individu memiliki sifat dasar atau mendasar. Banyak insiden pelanggaran hak asasi manusia terjadi karena kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai pokok yang melekat pada setiap individu, sehingga orang dengan mudah melanggar hak-hak orang lain. Namun perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan baik dari segi hukum, politik, sosial dan budaya. Dalam penelitian ini membahas beberapa kasus diskriminasi dan kekerasan yang ada di Indonesia yang menunjukkan betapa sulitnya melindungi dan memajukan hak asasi manusia di negeri ini. Beberapa permasalahan HAM kontemporer di Indonesia contohnya pada diskriminasi dan kesenjangan, hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan lembaga penegak hukum, pengembangan budaya HAM, dan pelibatan masyarakat sipil dalam implementasi HAM.

ABSTRACT

Human Rights (HAM) are rights inherent in every person without discrimination. Human rights reflect that the power or rights possessed by individuals have a basic or fundamental nature. Many incidents of human rights violations occur due to a lack of understanding of the basic values inherent in each individual, so that people easily violate the rights of others. However, the protection of human rights in Indonesia still faces various challenges and obstacles from a legal, political, social and cultural perspective. This research discusses several cases of discrimination and violence in Indonesia which show how difficult it is to protect and promote human rights in this country. Some contemporary human rights problems in Indonesia include discrimination and inequality, for example, things that can be done to improve human rights conditions in Indonesia, such as improving the quality of human resources, strengthening law enforcement institutions, developing a culture of human rights, and involving civil society in the implementation of human rights.

PENDAHULUAN

Menurut Muladi (2002) Martenson, hak asasi manusia mempunyai arti mereka hak yang menjadi milik kita dan tanpanya kita sebagai manusia tidak dapat hidup. Sejak Definisi yang diberikan Martenson dalam Mulad (2002) berarti hak asasi manusia itu melekat ciri khas kita manusia, yang juga berarti adanya hak asasi manusia orang ini lahir dalam diri setiap orang secara otomatis, bukan karena sifat-sifat khusus oleh undang-undang atau peraturan (Kaligis, 2009). Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan landasan moral yang mendasari keberadaan manusia. Konsep ini menekankan pada hak-hak dasar setiap orang yang harus diakui, dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Hak asasi manusia mencakup kebebasan, kesetaraan, martabat manusia, dan perlindungan dari penindasan. Dalam konteks yang berbeda, hak asasi manusia merupakan dasar keadilan, kebebasan dan martabat manusia.

Sejarah hak asasi manusia diawali dengan berbagai perjuangan dan pengorbanan yang menekankan bahwa setiap individu mempunyai hak yang tidak dapat dicabut, hak yang bersifat universal, tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat ditawarkan. Saat ini, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang dikeluarkan pada tahun 1948 menjadi tonggak penting yang meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi pedoman bagi semua negara dalam memperlakukan warga negaranya. Namun, tantangan terhadap hak asasi manusia tidak lekang oleh waktu. Meskipun berbagai deklarasi dan kesepakatan telah disusun, namun kenyataan praktisnya menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia masih sering terjadi di berbagai belahan dunia. Bahkan di Indonesia, negara dengan budaya dan etnis yang beragam, situasi hak asasi manusia menghadapi tantangan yang kompleks. Pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi dan kekerasan seringkali menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap

*Corresponding author

E-mail addresses: mutiarasalsabila2006@gmail.com

prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan kurangnya perlindungan hukum yang efektif. Faktor pemicu terjadinya pelanggaran HAM bisa bersifat multidimensi. Mulai dari maraknya kepentingan politik, pergulatan ekonomi yang tidak adil hingga permasalahan sosial dan budaya yang mempengaruhi sikap terhadap hak asasi manusia. Keamanan dan stabilitas negara juga menjadi faktor penentu perlindungan hak asasi manusia. Tidak jarang situasi konflik dan ketidakstabilan menciptakan ruang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Di tengah dinamika perkembangan teknologi dan globalisasi, tantangan hak asasi manusia menjadi semakin kompleks. Isu-isu seperti privasi di era digital, hak-hak imigran, hak-hak perempuan, hak lingkungan hidup dan hak-hak minoritas semakin menjadi sorotan. Semua ini menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia bukanlah suatu usaha yang statis, namun harus beradaptasi dengan perkembangan saat ini dan menerapkan hak asasi manusia dalam konteks yang lebih luas.

Tindakan Indonesia di masa depan akan memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai tantangan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang adil dan efektif, pendidikan hak asasi manusia yang komprehensif, kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dan kerja sama global untuk menyelesaikan berbagai masalah lintas batas sangat penting untuk perlindungan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam era kontemporer yang kompleks, tantangan baru muncul dalam memastikan perlindungan HAM secara efektif. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam penegakan HAM, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kasus diskriminasi dan ketimpangan terhadap kelompok minoritas, seperti ras, etnisitas, agama, gender, orientasi seksual, atau disabilitas. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, yang sering menjadi korban kekerasan domestik, pelecehan seksual, atau perdagangan manusia.

Tujuan utama Hak Asasi Manusia (HAM) adalah untuk melindungi, menghormati dan menjamin martabat setiap individu tanpa memandang latar belakang seperti ras, agama, gender atau faktor lainnya. Hal inilah yang menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan beradab. Tujuan utama dari hak asasi manusia adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang tidak dilanggar oleh pemerintah atau siapapun. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak seperti kebebasan berekspresi, hak atas keadilan, hak untuk hidup, perlindungan dari penyiksaan, kebebasan diskriminasi, akses terhadap pendidikan dan hak atas kesehatan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kami ingin menciptakan masyarakat inklusif di mana setiap orang diperlakukan dengan hormat, terdapat kesempatan yang sama dan perlindungan hak-hak pribadi adalah prioritas. Tujuan utamanya adalah menciptakan dunia di mana perdamaian, keadilan dan martabat manusia terpelihara dan dihormati sepenuhnya. Dengan implementasi hak asasi manusia yang kuat dapat menciptakan lingkungan di mana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses keadilan, layanan kesehatan, pendidikan dan kesempatan hidup. Bukan hanya soal pembuatan peraturan dan kebijakan, tapi juga soal kesadaran kolektif akan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap orang.

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka juga merupakan bagian penting dalam pemajuan hak asasi manusia. Hal ini mencakup kesetaraan tidak hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan hak asasi manusia memainkan peran kunci dalam mencapai hak asasi manusia yang maju. Hal ini membantu mengembangkan sikap yang menghormati, memahami dan mendukung hak-hak individu, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan beradab. Kesadaran dan perlindungan hak asasi manusia bukanlah tujuan yang statis, namun merupakan proses yang berkelanjutan. Upaya berkelanjutan untuk mendidik, melindungi dan mengadvokasi hak-hak individu merupakan hal mendasar dalam mencapai tujuan hak asasi manusia, yang pada akhirnya menciptakan dunia yang lebih adil dan bermartabat bagi semua orang.

Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, diskriminasi dan kekerasan terus berlanjut, sehingga terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Diskriminasi dan kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik ras, agama, gender, maupun kelompok minoritas. Di Indonesia, diskriminasi masih menjadi masalah yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, perumahan dan akses terhadap keadilan. Beberapa kelompok yang menghadapi diskriminasi di Indonesia antara lain etnis minoritas, agama minoritas, kelompok LGBT, dan perempuan. Diskriminasi ras dan etnis seringkali berujung pada perlakuan tidak adil terhadap etnis minoritas di Indonesia. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan dan pengakuan identitas budaya mereka. Diskriminasi juga membatasi akses kelompok agama minoritas terhadap layanan keagamaan dan meningkatkan intoleransi dan konflik beragama di banyak daerah. Diskriminasi gender juga merupakan masalah besar di Indonesia. Meskipun kemajuan telah

dicapai dalam perjuangan untuk kesetaraan gender, perempuan masih menghadapi kendala di banyak bidang, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan dan partisipasi politik. Kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, juga masih menjadi perhatian, dan kekerasan juga menjadi isu yang meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia di Indonesia. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, mental, dan seksual.

Dalam hal ini bentuk kekerasan yang sering terjadi di Indonesia antara lain kekerasan polisi, kekerasan terhadap pembela HAM, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan polisi merupakan masalah hak asasi manusia yang utama di Indonesia. Beberapa kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan telah dilaporkan, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan pembunuhan berencana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan yang lebih baik diperlukan untuk melindungi hak asasi individu dan bahwa kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia merupakan masalah yang serius. Aktivis yang berjuang untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia sering kali diintimidasi, diancam, dan diserang. Hal ini menyulitkan mereka dalam memperjuangkan hak-hak individu dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian. Kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia merupakan bentuk kekerasan yang sering dialami perempuan dan anak di Indonesia. Perlindungan yang memadai dan perlindungan hukum yang kuat diperlukan untuk melindungi mereka dari kekerasan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2016:13) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu atau lebih variabel (independen) tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain. penelitian ini dilihat dari terjadinya studi kasus pada diskriminasi dan kekerasan terhadap pelanggaran ham, hal tersebut dikarenakan tidak kuatnya implementasi kebijakan terhadap peraturan hak asasi manusia yang membuat terjadinya pelanggaran masih terjadi di indonesia dan menciptakan tantangan kontemporer untuk dapat maju terhadap ham di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Urgensi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap manusia, tanpa memandang agama, ras, latar belakang etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, atau status sosial. Hak-hak tersebut bersumber dari harkat dan martabat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Negara, hukum, pemerintah dan masyarakat harus menghormati, mendukung dan melindungi hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia meliputi hak pribadi, hak ekonomi, hak politik, dan hak atas perlindungan hukum dan keadilan. UU Hak Asasi Manusia No.39/1999. Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya di depan umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan hukum. Konstitusi (1945) mengabadikan hak untuk menganut suatu agama, menyelenggarakan ibadah keagamaan, dan memilih untuk tetap atau meninggalkan kewarganegaraan. Hak atas kebebasan beragama. Hak atas kebebasan berserikat dan berpendapat. Hak untuk berkomunikasi dan menerima informasi.

Urgensi hak asasi manusia sangat penting untuk menjamin kesejahteraan, kebebasan, dan keadilan bagi setiap manusia. Hak asasi manusia juga merupakan syarat untuk menciptakan perdamaian, kerukunan, dan kemajuan bagi bangsa dan dunia. Tanpa hak asasi manusia, manusia akan mudah terjebak dalam diskriminasi, penindasan, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak dasar. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus ditegakkan dan dipertahankan oleh semua pihak, baik individu maupun kolektif. Salah satu upaya untuk menegakkan dan mempertahankan hak asasi manusia adalah dengan mengadopsi dan meratifikasi instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan HAM. Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC), dan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Dengan meratifikasi instrumen-instrumen tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sesuai dengan standar internasional.

Selain itu, upaya lain untuk menegakkan dan mempertahankan hak asasi manusia adalah dengan mengatur dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dengan memiliki peraturan perundang-undangan tersebut, Indonesia berusaha untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan bagi hak asasi manusia di dalam negeri.

Dalam tantangan hak asasi manusia menurut Irene Khan hal yang dapat dilakukan untuk mengimplemetasikan tantangan ham dengan adanya perebutan nilai (perjuangan nilai). Terkikisnya hak asasi manusia hanya dapat dicegah dengan kemenangan, perjuangan nilai-nilai. Ironisnya, para pelanggar HAM justru berteriak soal nilai dan bukan hanya soal HAM. Hukum dan sistem. Perjuangan untuk hak asasi manusia sebenarnya adalah sebuah pertanyaan tentang bagaimana caranya Berbicara, dan bukan hanya tentang teks hak asasi manusia. Perjuangan nilai adalah wajib Pembela hak asasi manusia mendukung cara untuk melakukan percepatan imajinasi dan energi publik tentang hak asasi manusia sebagai sebuah pengalaman kehidupan nyata yang mereka hadapi, bukan sekedar soal hukum dan konsep berada di luar pengalaman mereka. Oleh karena itu, moralitas hak asasi manusia harus ditetapkan jauh lebih tinggi di atas hukum. Oleh karena itu, jika objek hukumnya (misalnya terorisme) membiarkan orang disiksa, maka hal itu perlu secara moral bertentangan karena melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak boleh ditoleransi. Aktivis hak asasi manusia untuk mengembalikan hak asasi manusia, membentuk kembali perdebatan tentang hak asasi manusia tidak hanya dari sisi hukum, namun juga dari sisi moral hak asasi manusia berdasarkan klaim tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam hal ini dapat dilihat memperjuangkan hak-hak Ecosob. Masalah kemanusiaan yang penting yang universal adalah tentang kemiskinan dan kesenjangan. Jadi itu merupakan pelanggaran Hak asasi manusia harus berusaha menyoroti berbagai permasalahan ekonomi dan sosial. Sebuah tantangan Hak asasi manusia modern ditandai dengan melemahnya upaya negara untuk memperluas dukungan mereka terhadap perjuangan hak-hak Ecosob Selesai Dalam struktur hak asasi manusia, tidak ada hierarki antara hak sipil dan hak politik dengan hak-hak ekonomi dan sosial yang melibatkan banyak aktor, terutama aktor baru. Kontrol aktor negara dalam sistem hak asasi manusia merupakan realitas hukum. Negara punya tugas untuk penerapan, realisasi, pemajuan dan penghormatan hak asasi manusia. Realitas nasionalisasi saat ini meresap ke dalam berbagai peran publik negara privatisasi penyelenggaraan berbagai barang publik dan barang umum. Masuknya operator baru Perwujudan hak-hak publik memerlukan upaya untuk melibatkan aktor-aktor baru hal ini dapat dilihat pada Pemerintah, swasta dan sebagainya.

2. Hukum dan Peraturan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia telah mengakui hak asasi manusia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, dengan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. UUD 1945 memuat beberapa pasal yang menjamin hak asasi manusia, seperti Pasal 27 sampai dengan 34 yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, dilakukan beberapa amandemen terhadap UUD 1945 untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, seperti Pasal 28A-J yang mengatur lebih rinci tentang hak asasi manusia, dan Pasal 28I(4) yang menyatakan hak untuk hidup, tidak boleh disiksa, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dimintai pertanggungjawaban secara surut demi hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Konsep keadilan juga dipengaruhi oleh sudut pandang sosial budaya berbeda antar negara Namun globalisasi dalam hal keadilan sosial. Ketersediaan instrumen hak asasi manusia terkadang bukan merupakan jaminan Perlindungan hak asasi manusia memerlukan komitmen dan dukungan semua pihak Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia tampaknya terkonsentrasi di Indonesia Pelanggaran pemerintah terhadap masyarakat. Bahkan ada banyak permasalahan hak asasi manusia di Indonesia dalam hal perlindungan hak asasi manusia dipengaruhi oleh dukungan atau bahkan bermuatan politik. Masalah pelanggaran hak asasi manusia menjadi rumit ketika pelakunya didukung oleh kekerasan politik besar (Hafner-Burton, 2014).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur tentang hak, perlindungan, bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada saksi dan korban di pengadilan. Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang pencegahan, penanggulangan dan perlindungan korban perdagangan orang. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang hak, perlindungan dan kesejahteraan anak. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang mengatur tentang kewajiban negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan keluarga. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta perolehan, kehilangan, dan pemulihan kewarganegaraan. Pembukaan Undang-Undang Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang hak

masyarakat atas akses terhadap informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik. Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 yang mengatur tentang asas, asas, hak dan kewajiban serta peranan negara dan masyarakat dalam pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, yang mengatur tentang pelarangan, penindakan dan perlindungan terhadap korban diskriminasi ras dan etnis. Perkembangan terkini dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilihat pada Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga negara independen yang mempunyai misi melakukan penelitian, investigasi, mediasi, pemantauan dan advokasi hak asasi manusia. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) sebagai lembaga ekstrastruktural yang misinya mengungkap kebenaran pelanggaran HAM berat di masa lalu dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk rekonsiliasi dan rehabilitasi korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga nonstruktural yang mempunyai misi memberikan perlindungan, pendampingan dan pelayanan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga ekstrastruktural yang bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memantau upaya pemberantasan terorisme, termasuk pencegahan, penindakan, dan ekstradisi. Ketentuan hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- Hukum hak asasi manusia internasional, yaitu peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berlaku secara universal bagi semua negara anggota. Contoh aturan hak asasi manusia internasional adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Ketentuan hukum, yaitu hukum nasional berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan peraturan lain yang mengatur hak asasi manusia di wilayah hukumnya masing-masing. Contoh peraturan nasional hak asasi manusia di Indonesia antara lain UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden No. 53 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-20253 Tahun 2021.

Peraturan hak asasi manusia nasional, yaitu konstitusi nasional, undang-undang, dan peraturan lain yang mengatur hak asasi manusia di yurisdiksi masing-masing. Contoh peraturan nasional hak asasi manusia di Indonesia antara lain UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional 2021-20253 Aturan HAM adalah aturan yang mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang patut dihormati dan dijunjung tinggi. Negara, hukum, pemerintahan dan segalanya untuk melindungi kehormatan dan martabat. Kutipan wawancara peneliti dengan bapak irwanto dosen Fisip “kalau dilihat alasan mengapa bahwa peraturan HAM dan hukum di Indonesia dianggap masih lemah. Pertama, implementasi undang-undang hak asasi manusia seringkali menghadapi tantangan dalam konteks dunia nyata. Meskipun terdapat peraturan yang mengakui hak asasi manusia, namun seringkali terdapat kesenjangan antara peraturan tersebut dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya konsistensi kepolisian, kurangnya sumber daya, atau kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia di tingkat penegakan hukum. Kedua, proses reformasi dan penyesuaian undang-undang seringkali berjalan lambat. Perubahan hukum yang diperlukan seringkali memerlukan waktu yang lama, terutama untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan perkembangan hak asasi manusia. Selain itu, terdapat faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Budaya yang masih berkisar pada nilai-nilai tradisional tertentu, serta stigma atau prasangka terhadap kelompok atau subyek yang berbeda, dapat menjadi hambatan untuk melakukan perubahan menuju pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas. Tantangan dan kepentingan politik juga mempengaruhi keberhasilan implementasi undang-undang hak asasi manusia. Terkadang kepentingan politik atau kekuatan tertentu dapat menghambat upaya penguatan perlindungan hak asasi manusia, terutama jika dianggap bertentangan dengan tujuan politik atau kepentingan tertentu.”

3. Diskriminasi Tantangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Di Indonesia, tantangan diskriminasi merupakan permasalahan yang mempunyai implikasi penting terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi berdasarkan agama, etnis, gender dan orientasi seksual, serta akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan dan keadilan. Salah satu contoh penting adalah diskriminasi terhadap etnis atau agama minoritas. Banyak kelompok etnis atau agama di Indonesia yang terus diperlakukan secara tidak adil dan tidak setara. Hal ini tercermin dari terbatasnya akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan layanan pasar tenaga kerja, yang pada gilirannya menghambat partisipasi mereka dalam

proses sosial dan ekonomi. Diskriminasi juga terlihat pada ketidaksetaraan gender. Meskipun kemajuan telah dicapai dalam mengakui hak-hak perempuan, masih banyak wilayah di mana perempuan mengalami diskriminasi. Misalnya saja terkait akses terhadap tempat kerja yang sama, gaji yang sama atau bahkan layanan kesehatan yang memadai. Konsekuensi dari diskriminasi ini sangat merugikan hak asasi manusia karena menghalangi kesetaraan, keadilan dan kebebasan pribadi. Diskriminasi tidak hanya membatasi peluang individu untuk berkembang secara penuh, namun juga menciptakan ketidakstabilan sosial dan konflik yang dapat melemahkan kohesi sosial. Selain itu, diskriminasi seringkali mendorong stigmatisasi terhadap kelompok tertentu, menciptakan kesenjangan sosial dan memperdalam perpecahan sosial. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, tetapi juga melemahkan kemajuan sosial, ekonomi dan politik negara.

Diskriminasi sangat merugikan hak asasi manusia seringkali tercermin dalam perilaku sehari-hari dan standar internal masyarakat. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, individu atau kelompok terus diperlakukan secara tidak setara atau dinilai secara negatif berdasarkan, misalnya, etnis, agama, atau orientasi seksual. Tantangan terbesar dari diskriminasi ini adalah tidak hanya sekedar persoalan hukum atau politik, namun juga memerlukan perubahan sikap, kesadaran dan budaya masyarakat secara umum. Diskriminasi dalam bidang sosial budaya seringkali sulit diubah karena sudah menjadi bagian dari cara berpikir yang terinternalisasi. Dampaknya terhadap hak asasi manusia sangatlah penting. Diskriminasi menghilangkan hak masyarakat untuk diakui, dihormati dan diperlakukan secara adil. Hal ini juga menghambat kemampuan individu untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Mengatasi masalah diskriminasi ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, lembaga hak asasi manusia, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah pencegahan dan intervensi yang luas diperlukan untuk menjamin kesadaran akan pentingnya kesetaraan, menghormati perbedaan dan memerangi segala bentuk diskriminasi. Dalam hal ini dapat mendorong dialog terbuka, pendidikan inklusif dan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan akan membantu mengubah paradigma masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap masyarakat menjadi lebih inklusif, lebih adil dan lebih menghormati hak asasi manusia bagi semua orang, apapun perbedaannya.

4. Kekerasan dan Ketidakadilan Anakronisme Hak Asasi Manusia

Tantangan terkait penerapan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, khususnya terkait kekerasan dan ketidakadilan, memberikan gambaran yang kompleks terhadap kondisi sosial dan hukum di negeri ini. Kekerasan, baik di ranah publik maupun di dalam negeri, telah menjadi bagian yang merugikan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya masih menjadi masalah serius. Pelecehan seksual, perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan terhadap anak adalah beberapa contoh tragis yang terjadi di sekitar kita.

Ketidakadilan sistem hukum juga menjadi kendala besar. Terdapat kelemahan dalam memastikan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua orang, terutama individu yang kurang beruntung atau kelompok minoritas. Lambatnya proses hukum, korupsi dalam sistem dan rendahnya kualitas bantuan hukum sering kali menghalangi individu untuk mendapatkan keadilan yang layak. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya merugikan para korban, namun juga mengancam terwujudnya masyarakat yang adil dan beradab. Kekerasan dan ketidakadilan tidak hanya merusak integritas moral tetapi juga menghambat pembangunan sosial, ekonomi dan politik suatu negara.

Penerapan hak asasi manusia yang efektif memerlukan langkah-langkah konkrit. Pertama, penegakan hukum yang kuat dan adil harus menjadi prioritas. Peradilan harus mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada korban kekerasan dan memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan hukum. Pendidikan masyarakat mengenai hak asasi manusia dan pentingnya kesetaraan serta penghormatan terhadap martabat manusia harus ditingkatkan. Kampanye pendidikan publik dan pendidikan hak asasi manusia yang lebih luas di seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi kunci penting untuk mengubah paradigma sosial.

Dalam hal ini peran negara, LSM dan swasta sangat penting. Kerjasama antara berbagai pihak untuk memperkuat sistem perlindungan, mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan penegakan hukum sangatlah penting. Sinergi yang kuat antara lembaga hak asasi manusia, otoritas kehakiman, dan pemerintah daerah juga merupakan faktor kunci untuk menjamin penerapan hak asasi manusia yang efektif dan efisien. Yang sangat penting adalah tindakan nyata seperti peningkatan akses terhadap pengadilan, peningkatan kualitas layanan bantuan hukum, dan penguatan badan hukum. Kekerasan dalam berbagai bentuk, baik di ranah publik maupun privat, merupakan permasalahan serius yang menghambat terselenggaranya bantuan hukum. Hak asasi manusia di negara ini. Peristiwa kekerasan, khususnya terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, masih menjadi permasalahan yang harus ditangani secara komprehensif.

Kekerasan terhadap perempuan, seperti pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, masih menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan. Anak juga tidak terlindungi dari ancaman

kekerasan fisik dan mental. Selain itu, kelompok rentan lainnya juga rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, seperti mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia atau kesulitan mengakses keadilan. Selain kekerasan, ketidakadilan sistem hukum juga menjadi tantangan serius. Akses terhadap keadilan yang setara masih belum merata, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi lemah atau termasuk dalam kelompok minoritas. Lambatnya proses hukum, korupsi dalam sistem dan terbatasnya akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas merupakan hambatan utama dalam mewujudkan keadilan yang layak. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan merusak landasan kemanusiaan. Kekerasan dan ketidakadilan tidak hanya merugikan korban secara individu, namun juga menghambat pembangunan sosial, ekonomi dan politik negara.

Mengatasi masalah kekerasan dan ketidakadilan hak asasi manusia memerlukan tindakan nyata. Perlindungan hukum yang tegas dan adil terhadap korban kekerasan dan perlindungan hukum yang konsisten terhadap pelaku kekerasan merupakan hal yang penting. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat tentang hak asasi manusia dan kesetaraan harus diintensifkan. Penanganan permasalahan kekerasan dan ketidakadilan terkait hak asasi manusia memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak. Hal ini memerlukan perubahan sikap, kesadaran dan tindakan nyata yang berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan LSM. Hanya dengan kerja sama yang kuat kita dapat membangun masyarakat yang adil dan aman yang menghormati hak asasi setiap orang.

5. Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

- Kasus pelanggaran HAM di Papua menjadi isu yang menarik perhatian internasional. Banyak laporan menunjukkan adanya penindasan, penangkapan sewenang-wenang, kekerasan dan pembatasan kebebasan sipil di wilayah tersebut. Respons hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua sering menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana hukum ditegakkan dan keadilan ditegakkan di wilayah tersebut. Meskipun pemerintah dan lembaga penegak hukum telah mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia, banyak pihak yang mengkritik tindakan tersebut karena tidak cukup. Lembaga penegak hukum di Papua seringkali menghadapi tantangan. Salah satunya adalah sulitnya mendapatkan bukti yang kuat dan transparan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan. Pengadilan yang terbuka dan adil adalah kuncinya, namun terkadang kesulitan ini menghalangi proses penegakan hukum yang efektif. Selain itu, campur tangan politik dan kebijakan keamanan yang ketat juga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Memantau laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer atau warga sipil sangat penting untuk menjamin independensi dan transparansi dalam pembelaan keadilan.
- Kasus HAM Minoritas Ahmadiyah merupakan kasus mengenai hak asasi Kelompok Ahmadiyah (HAM), aliran Islam yang dianggap menyimpang oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Ahmadiyah menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, intimidasi, kekerasan dan represi dari partai politik yang tidak menoleransi keberadaan dan keyakinan mereka. Respon hukum terhadap kasus ini masih kurang dan memuaskannya bagi Ahmadiyah. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tri-kementerian yang melarang Ahmadiyah menyebarkan ajaran dan kegiatannya secara publik dan mengancam sanksi hukum terhadap pelanggarnya. SKB ini dianggap sebagai pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi dan perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia.
- Pelanggaran hak asasi manusia terkait konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia yang berbasis di Aceh merupakan salah satu permasalahan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Selama konflik, yang berlangsung dari tahun 1976 hingga 2005, pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa dan pengusiran warga sipil dilaporkan terjadi di kedua sisi. Respon hukum terhadap kasus ini masih belum memuaskan baik dari segi penegakan hukum maupun pemulihan korban. Banyak kasus yang tidak ditanggapi secara serius oleh pihak berwenang atau hanya ditangani melalui mekanisme internal badan keamanan, yang seringkali kurang transparan dan independen. Praktek impunitas polisi dan militer memperburuk pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Selain itu, banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan, bantuan, dan layanan yang memadai baik dari segi medis, psikologis, dan hukum. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah hak asasi manusia di Aceh adalah perjanjian damai tahun 2005 antara GAM dan pemerintah Indonesia yang mengakhiri konflik bersenjata dan memberikan otonomi khusus kepada Aceh⁴. Perjanjian tersebut juga memuat klausul pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) Aceh. Tugas komisi ini adalah mengungkap kebenaran tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk rekonsiliasi dan rehabilitasi para korban.

SIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap manusia, tanpa memandang agama, ras, latar belakang etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, atau status sosial. Hak-hak tersebut bersumber dari harkat dan martabat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Negara, hukum, pemerintah dan masyarakat harus menghormati, mendukung dan melindungi hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia meliputi hak pribadi, hak ekonomi, hak politik, dan hak atas perlindungan hukum dan keadilan. UU Hak Asasi Manusia No.39/1999. Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya di depan umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan hukum. Konstitusi (1945) mengabadikan hak untuk menganut suatu agama, menyelenggarakan ibadah keagamaan, dan memilih untuk tetap atau meninggalkan kewarganegaraan. Hak atas kebebasan beragama. Hak atas kebebasan berserikat dan berpendapat. Hak untuk berkomunikasi dan menerima informasi. Tujuan utama Hak Asasi Manusia (HAM) adalah untuk melindungi, menghormati dan menjamin martabat setiap individu tanpa memandang latar belakang seperti ras, agama, gender atau faktor lainnya. Hal inilah yang menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan beradab. Tujuan utama dari hak asasi manusia adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang tidak dilanggar oleh pemerintah atau siapapun.

Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, diskriminasi dan kekerasan terus berlanjut, sehingga terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Diskriminasi dan kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik ras, agama, gender, maupun kelompok minoritas. Di Indonesia, diskriminasi masih menjadi masalah yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, perumahan dan akses terhadap keadilan. Beberapa kelompok yang menghadapi diskriminasi di Indonesia antara lain etnis minoritas, agama minoritas, kelompok LGBT, dan perempuan. Diskriminasi ras dan etnis seringkali berujung pada perlakuan tidak adil terhadap etnis minoritas di Indonesia. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan dan pengakuan identitas budaya mereka. Diskriminasi juga membatasi akses kelompok agama minoritas terhadap layanan keagamaan dan meningkatkan intoleransi dan konflik beragama di banyak daerah. Diskriminasi gender juga merupakan masalah besar di Indonesia. Meskipun kemajuan telah dicapai dalam perjuangan untuk kesetaraan gender, perempuan masih menghadapi kendala di banyak bidang, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan dan partisipasi politik.

REFERENSI

- M. R. Silva and A. Caetano, "Organizational Justice across Cultures: A Systematic Review of Four Decades of Research and Some Directions. For the Future," *Social Justice Research* 29, No. 1 (2016): 1-31. 32 A. L. Hillman, "Globalization and Social Justice," *The Singapore Economic Review* 53, No. 2 (2008): 173-189.
- Hadiprayitno, "Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia," *Human Rights Review* 11 (2010): 373-399.
- K. Tsutsui and J. W. Meyer, "International Human Rights Law and the Politics of Legitimation Repressive States and Human Rights Treaties," *International Sociology* 23, No. 1 (2008): 115-141.
- Beck, Herman L., "The rupture between the Muhammadiyah and the Ahmadiyah", *BKI*, Vol. 161, No. 2/3, 2005, hlm. 210-246 Fealy, Greg dan Anthony Bubalo, 2007, *Jejak Kafilah*.
- Parekh, Bikhu. (2008). *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Impulse-Kanisius.
- Amiruddin al-Rahab. (2016). Pelanggaran HAM yang Berat di Papua: Konteks dan Solusinya. *Ham*. 21-51.
- Stev, K.R. (2013). Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia. *Lex Administratum*. 1(2), 56-64.
- Halili. (2009). Tantangan Kontemporer Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Gerakan Hak Asasi Manusia. *Kajian Kewarganegaraan*. 6(1), 4.
- Budiarjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 320.